

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Daerah Istimewa Yogyakarta Province in Figures 2025 Volume 47*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY, 2025.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.

Iskandar, Nandan, et al. *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum*. Jakarta: Penerbit Miswar, 2017.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pakem Tahun 2025*. Yogyakarta: Kejati DIY, 2025.

Luthfi, Hanif. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Rtujuh Media Printing, 2024.

Sihombing, Uli P., et al. *Menggugat Bakor Pakem Kajian terhadap Tim Pakem dan Pengawasan Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit the Indonesian Legal Resource Center, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2022.

Sururama, R., dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Penerbit Cendekia Press, 2020.

Tjandra, W. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

JURNAL

Arfan, Daikan A. “Efektivitas Kejaksaan Negeri Cilacap dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan yang Berkembang dalam Masyarakat Cilacap,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 23.

Ayun, Rati P. “Aliran-aliran Paham Keagamaan dalam Islam Berlandaskan Moderasi Beragama.” *Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 2 (2024): 186.

Bur, Alfian. “Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang.” *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 4 (2021): 355.

Imron, A., Anggi Eryana, dan Rohmat Suprpto. “Kejawen dalam Pandangan Islam.” *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education* 7, no. 1 (2023): 72.

Ma'mur, Jamal. “Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI.” *Jurnal Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018): 42.

Nasution, Aulia R. “Kebebasan Beragama dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 67.

Pakasi, Geraldly. “Independensi Kedudukan Kejaksaan dalam Melaksanakan Tugas Kejaksaan di Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* XII, no. 3 (2023): 1.

Sahetapy, Marcelina A. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tata Negara.” *Jurnal Multilingual* 5, no. 2 (2025): 341.

Sajari, Dimiyati. "Fatwa MUI tentang Aliran Sesat di Indonesia." *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 1 (2015): 46.

Tamam, Ahmad B. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al-Musthofa Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 64.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung 19 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kementertian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

SUMBER LAIN:

TESIS

Mutalib, Muhammad T. “Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Indonesia”. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.

WAWANCARA

Vendrio Arthaleza, S.E., S.H., M.Hum. Kepala Seksi V pada Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Arief Efvendi, S.H. Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

INTERNET

Darmawan, Agus D. “93% Penduduk DI Yogyakarta Beragama Islam” databoks.katadata.co.id. Diakses pada 9 November 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7e70ebe414fb74c/93-penduduk-di-di-yogyakarta-beragama-islam>.

Fadhlulrahman, Irfan. “Penduduk DI Yogyakarta Capai 3,72 Juta Jiwa, 29% ada di Kab. Sleman pada Juni 2024” databoks.katadata.co.id. Diakses pada 9

November 2025.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a84daf80c1fef99/penduduk-di-yogyakarta-capai-372-juta-jiwa-29-ada-di-kab-sleman-pada-juni-2024>.

Hakim, Luqman. “79 Aliran Kepercayaan di DIY Dijamin Dilindungi” www.antaranews.com Diakses pada 9 November 2025
<https://www.antaranews.com/berita/533961/79-aliran-kepercayaan-di-diy-dijamin-dilindungi>.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Tentang Kejaksaan.” Kejaksaan.go.id.
<https://www.kejaksaan.go.id/about/info> (diakses pada 8 November 2025).

MUI Digital. “Sejarah MUI.” Mirror.mui.or.id. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/> (diakses pada 14 Desember 2025).

MUI Kabupaten Lamandau. “Visi, Misi & Tujuan MUI.” Mui-lamandau.or.id.
www.mui-lamandau.or.id/pg/visi/ (diakses pada 14 Desember 2025).

Nasrul, Erdy. “Al Zaytun yang Kontroversial: Dari Isu NII Palsu, Aliran Sesat, dan Pelecehan” analisis.republika.co.id Diakses pada 6 November 2025
<https://analisis.republika.co.id/berita/rtn0e451/al-zaytun-yang-kontroversial-dari-isu-nii-palsu-aliran-sesat-dan-pelecehan>.

Putri, R. “Fakta- fakta tentang Ponpes Al Zaytun, Didemo Karena Diduga Ajaran Sesat” www.tempo.co Diakses pada 6 November 2025
<https://www.tempo.co/arsip/fakta-fakta-tentang-ponpes-al-zaytun-didemo-karena-diduga-ajaran-sesat-173864>.

Portal Informasi Indonesia. “Agama.” Indonesia.go.id.
<https://indonesia.go.id/profil/agama> (diakses pada 8 November 2025).